

KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, PERTUMBUHAN EKONOMI

Achla Nurus Shoba

achlans22@gmail.com

Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of Local-owned Source Revenue, revenue sharing fund, and economy growth on local finance independence of districts/ cities in East Java during 2018-2020. The research was quantitative with secondary data. The data were taken from official website of Directorate General of Fiscal Balance, Republic of Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id) and Central Bureau of Statistic, East Java (www.jatim.bps.go.id). Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with that, there were 114 observation data from 38 districts/cities in East Java. Since some data did not distribute normally yet, there were 32 outlier data. In total, there were 82 data. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 26. The research result concluded that Local-owned Source Revenue had a positive effect on local finance independence. On the other hand, the revenue sharing fund did not affect local finance independence. Likewise, economy growth did not affect local finance independence.

Keywords: local-owned source revenue, revenue sharing fund, economy growth, local finance independence

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2018-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik Jawa Timur (www.jatim.bps.go.id). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan metode tersebut, didapat 114 data observasi dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Karena data yang digunakan belum berdistribusi normal, maka dilakukan outlier dengan mengeluarkan 32 data sehingga tersisa 82 data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi, kemandirian keuangan daerah

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah sendiri adalah menjadikan daerah tersebut mandiri dalam segala hal pemerintahan

serta meningkatkan kesejahteraan umum, pelayanan publik, dan daya saing daerah namun tentunya tidak luput dari pengawasan dan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat.

Menurut Harefa (2018) ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonominya secara efektif, yaitu (1) besarnya kemampuan keuangan daerah, yang berarti kemampuan dan kewenangan pada sumber-sumber keuangan, mengelola, dan penggunaan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dapat digali, dan (2) berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat, di mana pendapatan asli daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam implementasinya hampir seperempat abad berlangsungnya otonomi daerah di Indonesia nyatanya masih banyak mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut diperkuat oleh tingkat ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara nasional sebesar 80,1% sedangkan tingkat kontribusi pendapatan asli daerah hanya sekitar 12,87% (Nugraha, 2019).

Kemampuan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah haruslah dimiliki oleh daerah otonom. Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Peningkatan kemandirian keuangan daerah dapat dicapai dengan beberapa cara seperti melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah misalnya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dan mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah (Rosidan, 2021). Fenomena keuangan daerah secara umum yang saat ini dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia relatif kecil kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dalam struktur rumah tangga (Nurhasanah dan Maria, 2017). Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2020) hasil perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) membuktikan bahwa masih adanya kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah yang sangat tinggi dan sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri.

Pendapatan asli daerah memberikan gambaran yang mencerminkan kemandirian suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah daripada bantuan dari pemerintah pusat maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut tinggi. Besar kecilnya pendapatan daerah dari pembayaran pajak dan retribusi oleh masyarakat berdampak pada kesanggupan pemerintah daerah dalam mendanai pemerintahannya sendiri seperti pembangunan dan pelayanan pada masyarakat sehingga dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Masih adanya kesenjangan antar daerah yang terjadi karena pembangunan yang tidak didasarkan pada kondisi lokal yang ditinjau dari berbagai indeks seperti pendapatan per kapita antar daerah serta masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (Bastian, 2006:354). Oleh karena itu, dalam mengurangi kesenjangan daerah, pemerintah pusat memberikan dana transfer yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan daerah.

Salah satu faktor penting dalam kesejahteraan masyarakat yaitu perekonomian. Perekonomian yang mengalami pertumbuhan akan berdampak baik pada penghasilan masyarakat, artinya pendapatan masyarakat bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Kaur dan Singh (2016) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan penekanan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah di negara berkembang. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Sejumlah penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai kemandirian keuangan daerah dengan variabel dan hasil yang berbeda. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nur'ainy (2013) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mampu mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Penelitian oleh Triganda (2018) menyebutkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pada pertumbuhan ekonomi. Gaghana *et al.*, (2018) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?, (2) apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?, (3) apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis: (1) pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, (2) pengaruh dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah, (3) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan teori yang menganggap bahwa situasi dimana ketika para manajer termotivasi pada sasaran hasil utama mereka daripada termotivasi terhadap tujuan-tujuan individu, sehingga teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para *manager* berperan sebagai *steward* yang termotivasi agar bertindak (Pratiwi *et al.*, 2018). Peranan pemerintah selaku *steward* memiliki tugas dalam memberi pelayanan publik kepada masyarakat selaku *principal*.

Dalam teori *stewardship* diasumsikan bahwa semua manusia dapat dipercaya, sehingga dapat menciptakan hubungan yang erat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik, dengan *steward* tidak mementingkan kepentingan individu melainkan kepentingan bersama (Sudaryo *et al.*, 2017). Pemerintah akan berusaha menjalankan dan memaksimalkan kinerja sebagai tujuan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. *Steward* merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku *principal* merupakan penilaian yang rasional karena *steward* lebih mementingkan upaya pencapaian tujuan organisasi (Wahyuni dan Ardini, 2018).

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan pelimpahan sejumlah wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Dengan otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki wewenang dalam mengoptimalkan pendapatan daerah serta mengalokasikannya secara mandiri. Menurut Halim (2011:253) ciri utama daerah yang dapat menjalankan otonominya adalah kemampuan keuangan daerah, dengan arti memungkinkan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola keuangannya sendiri dan mendanainya untuk kegiatan pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan seluruh daerah di Indonesia dapat menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertopang pada pendapatan asli daerahnya sendiri (Gaghana *et al.*, 2018).

Suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu instansi terdapat kelebihan dan kelemahannya tidak terlepas pada otonomi daerah dalam proses pelaksanaannya memiliki kelebihan dan kelemahan (Aji *et al.*, 2018). Salah satu kelebihan dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun daerah

demikian kemajuan dan kepentingan bersama, sedangkan kelemahannya yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mungkin tidak relevan dengan keadaan suatu daerah.

Keuangan Daerah

Daerah diberikan hak untuk memperoleh sumber keuangannya yang antara lain berupa kepastian adanya pendanaan dari pemerintah pusat yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan pertimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah. Keuangan daerah memiliki peran penting dalam otonomi daerah karena gambaran dari suatu daerah yang mampu dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya adalah berasal dari keuangan daerahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, serta alat koordinasi untuk semua kegiatan dari berbagai unit kerja. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. APBD sendiri terdiri dari 3 komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kemandirian Keuangan Daerah

Suatu daerah dikatakan mandiri apabila pendapatan asli daerah tersebut lebih besar dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah merupakan gambaran dari bergantungnya suatu daerah terhadap tingkat partisipasi pemerintah pusat yang berkontribusi dalam pendapatan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah berarti semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam menciptakan kemandirian keuangan di setiap daerah, pemerintah harus berupaya dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta memperbaiki segala sektor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tabel 1
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan	Rasio Kemandirian (%)	Pola
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultif
Sedang	>50-75	partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2004:188)

Menurut Halim (2004:188) dalam Tabel 1 dijelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut: (a) Pola hubungan instruktif yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu menjalankan otonomi daerah secara finansial). (b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. (c) Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat. (d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasal 1 (18) pengertian pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah dengan tujuan untuk membuat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya. Komposisi pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan sumber daya yang cukup besar, dalam hal ini daerah tidak hanya mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat, sehingga daerah tersebut harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan seluruh pengeluaran daerah dalam era otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Pendapatan asli daerah berperan penting dalam pembiayaan dan pembangunan daerah karena besarnya kontribusi yang diberikan menggambarkan daerah tersebut memiliki kemampuan melaksanakan otonomi daerah.

Tabel 2

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah atau Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00%	Sangat Kurang
10,01-20,00%	Kurang
20,01-30,00%	Sedang
30,01-40,00%	Cukup
40,01-50,00%	Baik
>50,01%	Sangat Baik

Sumber: Purba dan Hutabarat (2017)

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan dana yang dialokasikan untuk pemerintah daerah dari pendapatan APBN yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal. Tujuan dari adanya dana bagi hasil ini adalah untuk menyeimbangkan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana bagi hasil berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena penerimaannya berdasarkan potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Maka dari itu, apabila pemerintah daerah menginginkan transfer dana bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki.

Pertumbuhan Ekonomi

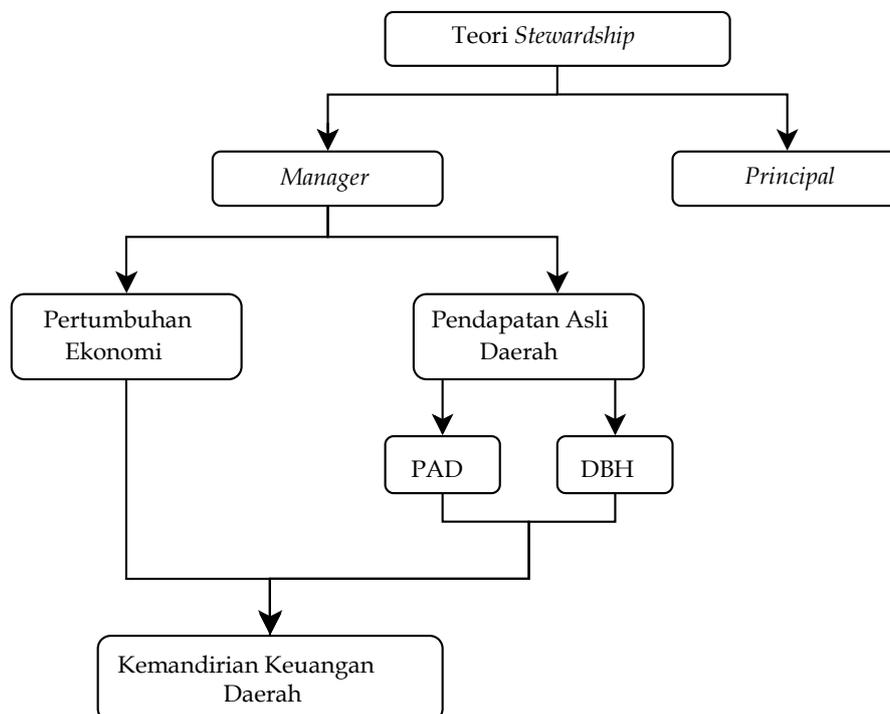
Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Triganda, 2018). Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Investasi dapat dijadikan salah satu instrumen atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin intens. Investasi juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Dengan meningkatnya investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan meningkatkan

bisnis-bisnis baru yang bermunculan sehingga dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disusun rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dipungut dari daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk. Kemandirian suatu daerah dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni dan Ardini (2018) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Hal ini berarti bahwa apabila pendapatan asli daerah suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah pusat bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Erinosa (2020) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah secara positif memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan melihat potensi daerah penghasil pendapatan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dana bagi hasil tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Apabila pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi, maka harus dapat mengoptimalkan potensi pendapatan dari pajak dan sumber pendapatan yang dimiliki daerah, sehingga kontribusi dari dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat bertambah. Dengan dana tersebut maka diharapkan pemerintah daerah secara mandiri dapat menjalankan kewenangan yang dilimpahkan. Penelitian yang dilakukan oleh Triganda (2018) menunjukkan bahwa dana bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Riau pada tahun 2012-2015. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Ada permintaan yang kuat dari investor di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini merupakan kemampuan daerah dalam mengelola sumber dayanya, sekaligus merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya, dan dengan naiknya PDRB maka kemampuan keuangannya meningkat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerahnya meningkat.

Berdasarkan penelitian yang mendukung pernyataan tersebut yang dilakukan oleh Alrasyid (2018) menunjukkan hasil bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan asli daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara teoritis yaitu jumlah penduduk dan Produk Domestik Belanja Bruto (PDRB). Dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi menciptakan peningkatan produksi barang dan jasa. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara membandingkan PDRB tahun tertentu dengan PDRB tahun sebelumnya berdasar atas harga konstan.

H₃: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme, digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan alat penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan maksud untuk menguji hipotesis yang dirumuskan (Sugiyono, 2013:8). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2020 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Objek dari penelitian ini adalah laporan realisasi APBD dan data PDRB.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian. Adapun sampel dari populasi dalam penelitian ini, yaitu (1) Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah mempublikasikan laporan realisasi APBD pada website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Republik Indonesia (www.djpk.menkeu.go.id) pada tahun 2018-2020, (2) Tersedianya data PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur selama 2018-2020.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD dan data PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2020. Data tersebut diperoleh melalui perantara yaitu pada website resmi Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJPK) Republik Indonesia (www.djpk.menkeu.go.id) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan metode dokumentasi dengan pengumpulan berupa data dokumentasi dan arsip - arsip resmi. Berdasarkan dari waktu pengumpulannya, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *time-series*. Berdasarkan sifatnya, data yang digunakan adalah data kuantitatif karena data diperoleh dalam bentuk angka-angka.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya pendapatan asli daerah dibanding pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Menurut Anynda dan Hermanto (2020) formula yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasal 1 (18) menyatakan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam menghitung rasio pendapatan asli daerah menurut Marizka (2013) sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan bagian dari dana perimbangan yang penerimaannya berdasarkan dari potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial serta menjadi salah satu dasar pemerintahan dalam mendapatkan dana pembangunan daerah dan memenuhi belanja daerah yang bukan bersumber dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Formula untuk rasio dana bagi hasil menurut Marizka (2013) sebagai berikut:

$$\text{Dana Bagi Hasil} = \frac{\text{Dana Bagi Hasil}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan Produk Domestik Bruto PDB atau PNB tanpa memandang besar kecilnya kenaikan tingkat pertumbuhan penduduk, atau adanya perubahan struktur ekonomi. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Perhitungan pertumbuhan ekonomi menurut Handayani dan Erinos (2020) sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang dibuat untuk memudahkan membaca dan memudahkan dalam memahami maksudnya. Hasil dari analisis ini berupa diagram, tabel maupun gambar. Tujuan analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi kenormalan distribusi residual yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam analisis grafik yang digunakan yaitu grafik normal probabiltiy plot. Apabila distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji Kolmogorov-Sminov digunakan untuk menguji normalitas residual. Kriteria dalam penerapan uji Kolmogorov-Smirnov adalah apabila nilai di bawah 0,05 berarti data yang diuji tidak normal, dan jika nilai di atas 0,05 berarti data tersebut normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini ditujukan untuk menguji apakah ditemukan atau tidaknya korelasi antar variabel independen pada model regresi yang dibentuk. Pengujian ini dapat dilihat berdasarkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan tolerance value. Apabila *tolerance value* > 0,10 dan VIF < 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji asumsi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu yang varian dari residual satu ke residual yang lain tetap atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dikatakan terdapat heteroskedastisitas apabila: (a) titik-titik penyebarannya membentuk pola tertentu yang membentuk gelombang, melebar kemudian menyempit; (b) titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0.

Uji Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk menguji asumsi apakah dalam regresi linear terdapat korelasi antara variabel dependen dengan dirinya sendiri. Ketentuan untuk menentukan suatu model regresi yang dikatakan tidak terdapat autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tdk ada autokorelasi negatif	No Desicion	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada korelasi positif	No Desicion	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tdk ada autokorelasi positif atau negatif	Tdk ditolak	$du < d < -du$

Sumber: Ghozali (2018:112)

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dimana hal tersebut dapat menjelaskan ketergantungan variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan analisis regresi sebagai berikut:

$$\text{KKD} = \alpha + \beta_1\text{PAD} + \beta_2\text{DBH} + \beta_3\text{PE} + e$$

Keterangan:

KKD : Kemandirian keuangan daerah

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien dari variabel independen

X_1 : Pendapatan asli daerah

X_2 : Dana bagi hasil

X_3 : Pertumbuhan ekonomi

e : Error

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini digunakan untuk mengukur besarnya persentase varian yang pengaruhnya diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengukuran besarnya presentase kebenaran dari uji regresi dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol (0) dan satu (1). Nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2018:97). Jika nilai koefisien determinasi regresi mendekati satu, maka semakin baik regresi tersebut, dan jika mendekati nol maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Uji F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Menurut Ghozali (2018:98) kualifikasi pada pengujian tersebut yaitu: (a) jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ dan nilai F hitung $> F$ tabel, maka hipotesis dikatakan layak diterima sehingga dapat dikatakan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen; (b) jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ dan nilai F hitung $< F$ tabel, maka hipotesis dikatakan tidak layak sehingga dapat dikatakan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t

Menurut Ghozali (2018:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan sejauh mana pengaruh variabel independen menerangkan variasi variabel dependen. Dalam menentukan keputusan yang digunakan dalam uji t terdapat kriteria pengujian menurut yaitu sebagai berikut: (a) jika nilai nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen; (b) jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	82	8,28	23,49	14,9955	3,77916
DBH	82	3,35	45,61	6,9604	5,97807
PE	82	-6,45	6,51	2,7551	3,76678
KKD	82	9,28	31,47	18,6112	5,47684
Valid N (listwise)	82				

Sumber: Data Sekunder, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui hasil analisis statistik deskriptif pada pendapatan asli daerah yang memiliki nilai minimum sebesar 8,28% diduduki oleh Kabupaten Sumenep pada tahun 2018. Nilai maksimum sebesar 23,49% dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) didapat dengan nilai sebesar 14,9955% di mana jika disandingkan dengan *range theory* pada Tabel 5 di bawah, nilai tersebut berada di tingkat kurang yang artinya daerah masih belum bisa mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerahnya. Nilai standar deviasinya sebesar 3,77916%.

Tabel 5
Range Theory

<i>Range Theory</i>	Indikator	Interpretasi	Pola
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	0,00-10,00%	Sangat Kurang	
	10,01-20,00%	Kurang	
	20,01-30,00%	Sedang	
	30,01-40,00%	Cukup	
	40,01-50,00%	Baik	
Kemandirian Keuangan Daerah	>50,01%	Sangat Baik	
	0-25	Rendah Sekali	Instruktif
	>25-50	Rendah	Konsultif
	>50-75	Sedang	Pastipatif
	>75-100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Purba dan Hutabarat (2017), Halim (2004:188)

Dana bagi hasil dengan nilai minimum sebesar 3,35% dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 45,61% diduduki oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) didapat dengan nilai sebesar 6,9604% yang artinya masih belum rata-pembagian dana bagi hasil yang pembagiannya didasarkan dengan potensi daerah. Nilai standar deviasinya sebesar 5,97807%.

Pertumbuhan ekonomi dengan nilai minimum sebesar -6,45% adalah Kota Batu pada tahun 2020. Hal ini dapat dikatakan bahwa daerah pada tahun tersebut mengalami penurunan ekonomi di sektor akomodasi serta restoran yang merupakan imbas dari pembatasan kegiatan sosial masyarakat dengan tujuan menurunkan angka penularan Covid-19. Namun nilai maksimum sebesar 6,51% dimiliki oleh daerah yang sama yaitu Kota Batu pada tahun 2019. Mengingat Kota Batu merupakan daerah wisata, sehingga peningkatan ekonomi diperkuat oleh sektor akomodasi. Selain itu, perdagangan, pertanian serta konsumsi rumah tangga juga mendukung meningkatkan pembangunannya. Nilai rata-rata (mean) didapat dengan nilai sebesar 2,7551% di mana pada tahun 2020 seluruh daerah cenderung menurun perekonomiannya. Nilai standar deviasinya sebesar 3,76678%.

Kemandirian keuangan daerah yang memiliki nilai minimum 9,28% ditempati oleh Kabupaten Sumenep pada tahun 2018. Nilai maksimum dari kemandirian keuangan daerah sebesar 31,47% dimiliki oleh Kota Madiun pada tahun 2020. Nilai rata-rata (mean) didapat dengan nilai sebesar 18,6112% di mana jika disandingkan dengan *range theory* pada Tabel 5, maka tergolong masih rendah sekali dengan pola instruktif. Nilai standar deviasinya sebesar 5,47684%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada pengujian normalitas awal dengan grafik normal probability plot dan uji kolmogorov-smirnov belum berdistribusi normal, sehingga peneliti melakukan screening terhadap data yang digunakan untuk dilakukan *outlier*. Setelah dilakukan *outlier*, grafik normal probability plot menunjukkan adanya penyebaran titik - titik yang mengikuti arah garis diagonal dan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada uji kolmogorov smirnov di atas 0,05 sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pengujian multikolinearitas yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel independen menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Untuk hasil nilai VIF untuk setiap variabel independen menunjukkan nilai kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak menunjukkan adanya multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menggambarkan bahwa titik-titik pada grafik scatterplot menyebar secara merata dan tidak membentuk pola serta menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena hal tersebut, maka model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pada pengujian ini memberikan hasil bahwa uji autokorelasi dengan Durbin-Watson menunjukkan nilai DW sebesar 1,782. Dengan melihat tabel DW dengan $\alpha=5\%$, $n=82$, dan $k=3$, maka didapat nilai du sebesar 1,7176 sehingga didapat hasil $1,7176 < 1,782 < 2,2824$ yang berarti bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS 26 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1(Constant)	-3,046	,110		-27,574	,000
PAD	1,451	,007	1,002	203,178	,000
DBH	-,013	,005	-,014	-2,814	,006
PE	-,007	,007	-,005	-,982	,329

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data Sekunder, diolah 2022

Dari Tabel 6 di atas dapat membentuk persamaan regresi linear berganda yaitu:
 $KKD = -3,046 + 1,451PAD - 0,013DBH - 0,007PE + e$.

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, koefisien dari pendapatan asli daerah memiliki nilai sebesar 1,451. Hal tersebut menyiratkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh, maka akan diikuti dengan kenaikan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kedua, koefisien dari dana bagi hasil memiliki nilai sebesar -0,13. Nilai koefisien tersebut menunjukkan arah hubungan negatif atau berlawanan antara dana bagi hasil dan kemandirian keuangan daerah. Apabila dana bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 0,13, maka kemandirian keuangan daerah akan menurun sebesar 0,13. Dengan kata lain bahwa dana bagi hasil yang tinggi, maka tingkat kemandirian suatu daerah menjadi rendah.

Ketiga, koefisien dari pertumbuhan ekonomi memiliki nilai sebesar -0,007. Hal tersebut menunjukkan adanya arah hubungan negatif atau berlawanan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemandirian keuangan daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0,007, maka kemandirian keuangan daerah akan menurun sebesar 0,007. Artinya bahwa dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, maka tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi rendah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan nilai *R square* sebesar 0,998 yang berarti bahwa variabel independen di mana dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, dana

bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah sebesar 0,998% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Uji F

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, model tersebut dinyatakan layak.

Uji t

Berdasarkan hasil dari Tabel 6 di atas. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pengujian hipotesis antara variabel pendapatan asli daerah (X_1) terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari p-value dengan nilai beta sebesar 1,451. Oleh karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kedua, pengujian hipotesis antara variabel dana bagi hasil (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,006. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari p-value serta dengan nilai beta sebesar -0,013. Adanya tanda negatif pada nilai beta menunjukkan bahwa nilai beta berlawanan arah dan memberi pengaruh negatif, sehingga H_2 ditolak.

Ketiga, pengujian hipotesis antara variabel pertumbuhan ekonomi (X_3) terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,329. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari p-value serta dengan nilai beta sebesar -0,007. Oleh karena nilai signifikansi $0,329 > 0,05$ serta adanya tanda negatif pada nilai beta menunjukkan bahwa nilai beta berlawanan arah, sehingga H_3 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis pertama yang berbunyi bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah diterima. Artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima suatu daerah, maka akan menjadikan daerah tersebut semakin mandiri dalam membiayai kebutuhannya.

Pendapatan asli daerah ini diartikan sebagai sumber penerimaan utama dari suatu daerah. Oleh karena itu, semakin pemerintah daerah dapat menggali pajak daerah dan retribusi daerahnya maka akan meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan nilai rata-ratanya, kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih berada di tingkat kurang, terlebih dengan adanya pandemi yang terjadi di Indonesia pada 2020. Meskipun kontribusinya rendah namun daerah tersebut tetap mandiri karena pemerintah daerah telah membatasi belanjanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Suzan (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis kedua yang berbunyi bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah ditolak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pada dasarnya dana bagi hasil merupakan dana yang dialokasikan untuk daerah yang pembagiannya sesuai potensi yang dimiliki dengan tujuan mengurangi ketimpangan antar daerah. Semakin tinggi dana bagi hasil diharapkan suatu daerah menjadi semakin mandiri dengan meningkatkan pembangunan ekonominya. Dengan dana bagi hasil yang tinggi diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki.

Pada kenyataannya masih banyak terjadi pembagian dana bagi hasil yang tidak merata serta pembagiannya yang tidak tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari nilai reratanya sebesar 6,9604% yang lebih dekat nilai minimumnya dan masih jauh dari nilai maksimumnya. Belum meratanya pembagian dana bagi hasil terjadi karena pembagiannya berdasarkan potensi daerah penghasil, sedangkan setiap daerah memiliki perbedaan yang besar dalam jumlah penduduk, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Keterlambatan dalam pembagian dana bagi hasil pajak disebabkan penetapan alokasi sementara yang berdasarkan ekspektasi penerimaan PPh lebih tinggi dari alokasi definitif yang berdasarkan realisasi penerimaan PPh sesungguhnya (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2007). Hal tersebut menyebabkan sistem perencanaan pembangunan daerah terganggu. Apabila proses pembangunan terganggu, maka kemandirian akan sulit tercapai. Hasil pengujian hipotesis ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dan Maria (2017) pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013 yang menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis ketiga yang berbunyi bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah ditolak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Faktor penting dalam proses pembangunan daerah salah satunya berasal dari pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila nilai PDRB tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, maka akan meningkatkan pendapatan daerah sehingga akan meningkatkan kemandirian daerah. Apabila nilainya menurun, maka daerah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga daerah tersebut belum dapat dikatakan mandiri.

Perhitungan PDRB yang berdasarkan beberapa komponen pendapatan dapat memungkinkan peningkatan yang terjadi hanya pada pendapatan kelompok tertentu. Seperti pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi cenderung menurun, hal itu dipicu oleh adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga banyak yang terkena imbasnya. Hal tersebut menjadikan permintaan masyarakat menurun. Dampak lain yang ditimbulkan yaitu bertambahnya pengangguran yang terjadi sehingga masyarakat tidak lagi memiliki pendapatan. Hal itu menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menjadikan kesejahteraan masyarakat belum terpenuhi. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Novitasari dan Novitasari (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menguji, serta menarik sebuah kesimpulan berdasarkan hasil pengujian dari pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2018-2020. Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. (2) Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Masih adanya ketidakmerataan dalam pembagian dana bagi hasil merupakan salah satu faktor penyebab pembangunan suatu daerah terhambat sehingga terhambat pula kemandirian suatu daerah. Hal ini mencerminkan bahwa masih belum tercapainya desentralisasi fiskal sebagai metode dalam mengurangi ketimpangan antar daerah. (3) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Ketimpangan pendapatan yang terjadi merupakan salah satu faktor dari belum terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masih kurangnya lapangan pekerjaan sehingga masih banyak pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran juga menurunkan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang menurun.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada masa mendatang diharapkan untuk menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Selain itu, dapat memperbanyak objek penelitian dan lebih memperpanjang periode yang digunakan sehingga data yang didapatkan juga menjadi lebih akurat. Kedua, bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan dalam menentukan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menyatakan nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 18,6% di mana angka tersebut tergolong sangat rendah. Sehingga, pemerintah daerah harus lebih berupaya dalam meningkatkan penerimaan agar tidak lagi mengandalkan dana transfer pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. P., K. Kirya, dan G. P. A. J. Susila. 2018. Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Manajemen Indonesia* 3(1): 95-104.
- Alrasyid, M. F. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandar Lampung Tahun 2000-2016.
- Anynda, N. S., dan S. B. Hermanto. 2020. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(10).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.
- Bastian, I. 2006. *Akunansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2007. Rancangan Model Baru Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil. <http://www.anggaran-old.kemenkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=76>. Diakses tanggal 13 Februari 2022.
- Erawati, N. T., dan L. Suzan. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013). *E-Proceeding of Management* 2(3): 3259-3266.
- Gaghana, R. L., P. Kindangen, dan D. C. Rotinsulu. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Darah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon Dan Kota Kotamobagu) Ramona. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19(5): 1-18.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Sembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2004. *Akunansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

- _____. 2011. *Pengendalian Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YPKN. Yogyakarta.
- Handayani, T. U. dan Erinos. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2(1): 2348–2361.
- Harefa, M. 2018. Hubungan Dana Bagi Hasil Dengan Penerimaan Daerah Dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 9(2): 147–160.
- Kaur, M. dan L. Singh. 2016. Knowledge in the economic growth of developing economies. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development* 8(2): 205–212.
- Marizka, R. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011). *Journal Tunas Bangsa* 185–197.
- Novitasari, M. dan L. Novitasari. 2019. Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi* 3(2): 174–186.
- Nugraha, Y. N. 2019. Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia>. Diakses tanggal 19 Desember 2021.
- Nur'ainy, R. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota di Jawa Barat). *Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, & Teknik Sipil)* 5: 96–104.
- Nurhasanah dan Maria. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Kota Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 1(1): 60–73.
- Pratiwi, L. I., I. B. Riharjo, dan F. Fidiana. 2018. Flypaper Effect : Analisa Stewardship Pada Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7(10): 1–22.
- Purba, S. dan R. C. Hutabarat. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Kohesi* 1: 228–240.
- Rosidan, I. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah di Barlingmascakeb 2009-2017. *Skripsi*. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Sudaryo, Y., D. Sjarif, dan N. A. Sofiati. 2017. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Alfabeta. Bandung.
- Triganda, R. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2012-2015. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Wahyuni, E. dan L. Ardini. 2018. Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6): 1–16.